

Korupsi di Sumut Struktural dan Sistemik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap survei penilaian integritas (SPI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) turun secara signifikan tahun 2024.

“Skor SPI Sumut juga menunjukkan penurunan signifikan dari 66,37 pada 2023 menjadi 58,55 pada 2024,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Senin, (29/9).

Selain SPI, KPK juga menyebut nilai monitoring controlling surveillance for prevention (MCSP) di provinsi itu juga mengalami penurunan. Angka perencanaan yang jadi salah satu indikator turun sebanyak 35 poin dari tahun 2023.

“Untuk hasil MCSP Pemerintah Provinsi Sumut 2024 berada di angka 83 atau turun tujuh poin dibanding 2023. Aspek perencanaan menjadi sorotan dengan skor 63

■ Bersambung ke Hal 11

Penyaluran Subsidi BBM Disoal Purbaya Sentil Bahlil

Jakarta, MIMBAR - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyentil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Purbaya mengatakan basis data itu sudah tersedia dan bisa digunakan. Namun, Kementerian ESDM belum kunjung menggunakannya.

“Kita punya DTSEN. Ini sudah siap, sudah dipakai oleh Menteri Sosial (Saifulah Yusuf), tapi belum dimanfaatkan oleh Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia). Kami akan diskusi dengan mereka, supaya betul memakai DTSEN tersebut ke depan,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (30/9).

Purbaya menyebut selama ini masih ada orang kaya yang ikut menikmati subsidi dari pemerintah, terutama di sektor energi. Ia ingin penyaluran subsidi ke depan bisa lebih tepat sasaran.

Ia menekankan Pemerintah Indonesia belum bisa menyetop program subsidi. Menurut Purbaya, hal

■ Bersambung ke Hal 11

MK Tolak Gugatan Hapus Kolom Agama di KTP

Jakarta, MIMBAR - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi yang meminta penghapusan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Permohonan tersebut diajukan oleh seorang wiraswasta bernama Taufik Umar dan terdaftar dengan perkara nomor: 155/PUU-XXIII/2025.

“Mengadili: menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua Hakim MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan, Senin (29/9).

Menurut MK, permohonan tersebut tidak jelas atau kabur (obscur). Hal itu dilihat dari adanya ketidaksesuaian antara dalil permohonan dalam posita dengan petitum.

Kemudian dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya, serta adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan

■ Bersambung ke Hal 11

Wartawan Dicekik Saat Liput Dapur MBG

Jakarta, MIMBAR - Seorang wartawan media Warta Kota bernama Munir menjadi korban penganiayaan orang tak dikenal saat meliput lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) buntut keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami 20 siswa SDN 01 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Munir bercerita peristiwa bermula saat ia bersama rekannya, mencari SPPG yang diduga menyediakan MBG yang menyebabkan puluhan siswa SD itu keracunan.

“Saya cek Google Maps cuma ada SPPG Gedong 2, gangnya tepat di seberang Kampus Unindra. Pas saya sampai si Bapak penjaga (sudah tua) nyuruh masuk dikira saya tukang cuci ompreng,” kata Munir kepada wartawan, Selasa (30/9).

Munir dan Kiki pun masuk ke dalam, lalu memarkirkan kendaraannya. Setelahnya, Munir bertanya untuk bisa bertemu dengan Kepala SPPG.

“Tapi dia nyuruh keluar. Terus saya sama (rekan) Kiki keluar berserta motor-

■ Bersambung ke Hal 11



■ Dimana-mana gitu kok ...
■ He..he..he..

80% Timah Indonesia Diseludupkan

Opsgab Amankan Uang Negara Rp67 Triliun

Jakarta, MIMBAR - Presiden Prabowo mengungkap sendiri penyeludupan gila-gilaan hasil timah Indonesia ke luar negeri.

Menurut presiden, 80% timah yang dihasilkan dari Bangka Belitung (Babel) dikirim ke luar negeri secara ilegal. Merujuk pada catatan google, produksi timah Indonesia pada 2024 sekitar 45 ribu ton.

Bila catatan itu mendekati kebenaran, maka 80% dari

■ Bersambung ke Hal 11

Razia Pelat BL Saat Masuk Sumut

Dosen Hukum Unimal: Tindakan Bobby Dapat Dipidana

Medan, MIMBAR - Tindakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution menghentikan truk berpelat Aceh (BL) dan memaksa sopir mengganti pelat menjadi pelat Sumut (BK/BB) saat masuk wilayah Sumut, adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum.

“Dalam perspektif hukum administrasi negara, perbuatan tersebut jelas melampaui kewenangan seorang gubernur,” ungkap Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Muksalmina, SHI, MH, dilansir dari Serambinews.com, Selasa (29/9/2025).

Menurut Muksalmina, dalam Pasal 65 ayat (2) UU Nomor

■ Bersambung ke Hal 11

Di Medan, Siapa yang Tertawa dan Siapa yang Menangis?

Oleh : Ngatirin

Di balik semrawut izin bangunan, selalu ada yang tertawa. Mereka bukan rakyat kecil, tapi para penguasa, para cukong, para oknum pejabat, dan juga sebagian wakil rakyat.

Pola permainan sudah lama ter-

baca. Ada gedung berdiri tanpa izin lengkap. Tapi anehnya tetap mulus. Ada apartemen mewah nongol di pusat kota, padahal warga sekitar sudah ribut menolak. Tiba-tiba gedung itu jadi juga. Siapa yang bisa melawan kalau uang sudah berbicara?

■ Bersambung ke Hal 11

Jadwal Salat

8 RABI'UL AKHIR 1447 H

Imsak : 04:48 WIB	Ashar : 15:28 WIB
Subuh : 04:58 WIB	Maghrib : 18:20 WIB
Zuhur : 12:17 WIB	Isya : 19:29 WIB

■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah

Plat BL dan Pelajaran Komunikasi Publik

Oleh Dr. A. Rasyid, MA

Beberapa hari terakhir, publik dihebohkan dengan video viral di media sosial yang menampilkan sejumlah kendaraan berplat BL (Aceh) dihentikan di Medan dan ditempel stiker bertuliskan “ganti plat jadi BK”. Tak sedikit warganet yang menafsirkan peristiwa itu sebagai bentuk larangan bagi kendaraan Aceh masuk ke ibu kota Sumatera Utara.

Isu ini segera memantik reaksi keras. Banyak pihak menilai tindakan itu diskriminatif dan berpotensi mengganggu hubungan sosial budaya antara Aceh

■ Bersambung ke Hal 11

